

Asli

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**



**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung B Lt. 1 Komplek Sekretariat Daerah
Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar No. Telp (0271) 495039 Faks (0271) 495590
Website: www.diskominfo.karanganyarkab.go.id
Email: kominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja Diskominfo Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini secara substansial merupakan penerjemahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Renja Diskominfo berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, kinerja OPD dapat dilihat landasan hukum yang digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing- masing OPD.

Karanganyar, 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIS, S.Kom.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780210 200501 1 016

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	1
	KATA PENGANTAR	2
	DAFTAR ISI	3
	DAFTAR TABEL	4
BAB I	PENDAHULUAN	5
	A. Latar Belakang	5
	B. Landasan Hukum	5
	C. Maksud dan Tujuan	7
	D. Sistematika	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DISKOMINFO TAHUN 2023	9
	A. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023	9
	B. Perincian Alokasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 ...	10
	C. Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 ...	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .	27
	A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kuminikasi dan Informatika	27
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025	30
	A. Dana Indikatif	30
	B. Sumber Dana yang dibutuhkan	30
BAB V	PENUTUP	46
	A. Catatan Penting	46
	B. Kaidah Pelaksanaan	46
	C. Rencana Tindak Lanjut	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perincian Alokasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023	10
Tabel 2.2	Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Dinas Komuniasi dan Informatika Tahun 2023	11
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023	28
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023	30

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah salah satu wujud keharusan dari Undang-Undang tersebut.

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang bertujuan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kerja OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dari OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Secara tidak langsung, Renja juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunaanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat landasan hukum yang digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 antara lain :

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
- 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
 - 21 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya rencana kerja ini adalah :

- a. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan.
- c. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian tahun 2025.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan

Penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar ini bertujuan sebagai :

- a. Bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasarannya.
- b. Tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu satu tahun anggaran.

d. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN.

- a. Latar Belakang.
- b. Landasan Hukum.
- c. Maksud dan Tujuan.
- d. Sistematika.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.

- a. Perincian Alokasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023
- b. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.
- c. Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR.

- a. Dana Indikatif.
- b. Sumber Dana yang dibutuhkan.

BAB V. PENUTUP.

- a. Catatan Penting
- b. Kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasi dari rencana kerja tahun sebelumnya menjadi penting untuk menunjukkan seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan dari perencanaan kinerja sebelumnya. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran mengenai titik- titik kekurangan dalam pelayanan ke publik internal maupun publik eksternal, sehingga segera dapat diambil langkah-langkah perubahan.

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16), serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pegawai pada Dinas Daerah.

Alokasi anggaran dalam mewujudkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **12.615.515.464,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kab. Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	Rp. 4.596.194.795,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.817.483.318,-
3. Belanja Hibah	Rp. 200.000.000,-
4. Belanja Modal sebesar	Rp. 1.001.837.351,-
	Rp.12.615.515.464,-

Agar lebih jelas untuk Perincian Alokasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel. 2.1
Perincian Alokasi Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2023

No	Kelompok Belanja	Alokasi DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 4.596.194.795,-	Rp. 4.161.503.455,-	90,54
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.817.483.318,-	Rp. 6.706.971.200,-	98,38
3.	Belanja Hibah	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	100,00
4.	Belanja Modal	Rp. 1.001.837.351,-	Rp. 978.348.000,-	97,66
	Jumlah	Rp.12.615.515.464,-	Rp. 12.046.822.655-	95,49

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023

Secara rinci pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 disajikan dalam bentuk tabel realisasi program kerja pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian Target	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi		
02	<u>PENUNJANG</u> <u>URUSAN</u> <u>PEMERINTAHAN</u> <u>DAERAH</u>	<i>Nilai Sakip</i>	<i>Perencanaan, Pengadaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>							
01.2.01.01			Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.54.700.600	Rp.54.145.600	98,99	
				Output	Terlaksananya Pembuatan Laporan Kinerja OPD	%	100%	98,99 %		
				Outcome	Terlaksananya Pembuatan Laporan atau Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100%	98,99 %		
01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.9.782.900	Rp.9.782.900	100,00	
				Output	Terlaksananya Pembuatan Laporan Kinerja OPD	%	100%	100 %		
				Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan			100 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan		Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	
					Penyusunan					
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.4.596.194.795	Rp.4.596.194.795	90,54	
				Output	Terbayarnya Gaji ASN	%	100%	90,54 %		
				Outcome	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100%	90,54 %		
01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.304.834.800	Rp.296.175.500	97,16	
				Output	Terbayarnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100%	97,16 %		
				Outcome	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100%	97,16 %		
01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.46.452.000	Rp.41.332.000	88,98	

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Output	Terbayarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	88,98 %		
				Outcome	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester OPD	%	100%	88,98 %		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.15.000.000	Rp.14.860.500	99,07	
				Output	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	%	100%	99,07 %		
				Outcome	Kebutuhan Terpenuhi	%	100%	99,07 %		
01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.549.397.351	Rp.543.526.000	98,93	
				Output	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	%	100%	98,93 %		
				Outcome	Kebutuhan	%	100%	98,93 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
					Terpenuhi					
01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.36.803.218	Rp.36.679.795	99,66	
				Output	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	%	100%	99,66 %		
				Outcome	Kebutuhan Terpenuhi	%	100%	99,66 %		
01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.50.145.200	Rp.50.144.800	100	
				Output	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	%	100%	100 %		
				Outcome	Kebutuhan Terpenuhi	%	100%	100 %		
01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.24.930.000	Rp.24.900.000	99,88	
				Output	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	%	100%	99,88 %		
				Outcome	Kebutuhan Terpenuhi	%	100%	99,88 %		
01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.232.919.000	Rp.212.678.518	91,31	
				Output	Cakupan Pelayanan	%	100%	91,31 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
					Sarana Prasarana Aparatur					
				Outcome	Kebutuhan Terpenuhi	%	100%	91,31 %		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	100	
				Output	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100 %		
				Outcome	Kebutuhan Terpenuhi	%	100%	100 %		
01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.17.700.000	Rp.13.220.000	74,69	
				Output	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	74,69 %		
				Outcome	Kebutuhan Terpenuhi	%	100%	74,69 %		
			Pemeliharaan Barang Milik							

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.180.386.400	Rp.172.607.500	95,69	
				Output	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	%	100%	95,69 %		
				Outcome	Lancarnya Tugas Kantor	%	100%	95,69 %		
02	<u>Program Informasi dan Komunikasi Publik</u>	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a Jumlah OPD yang dikelola di bagi jumlah OPD secara keseluruhan dibagi 100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota							
02.2.01.02			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.45.226.600	Rp.45.040.600	99,59	
				Output	Tersedianya Dasar Hukum	%	100 %	99,59 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja					% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	
				yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif					
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100 %	99,59 %	
02.2.01.03			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi dan Pemerintah Daerah	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.203.821.600	Rp.201.093.100	98,66
				Output	Tersedianya Dasar Hukum yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif	%	100%	98,66 %	
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	98,66 %	
02.2.01.04			Pengelolaan Konten dan Perencanaan	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.725.537.000	Rp.719.859.000	99,22
				Output	Tersedianya Dasar Hukum	%	100%	99,22 %	

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
				Media Komunikasi Publik		yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif				
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,22 %		
02.2.01.05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.694.713.000	Rp.691.289.000	99,51	
				Output	Tersedianya Dasar Hukum yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif	%	100%	99,51 %		
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,51 %		
02.2.01.06			Pelayanan Informasi Publik	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.103.336.000	Rp.100.163.300	96,93	
				Output	Tersedianya Dasar Hukum	%	100%	96,93 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
					yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif					
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	96,93 %		
02.2.01.07			Layanan Hubungan Media	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.714.640.300	Rp.710.667.800	99,44	
				Output	Tersedianya Dasar Hukum yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif	%	100%	99,44 %		
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,44 %		
02.2.01.08			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.262.604.000	Rp.262.540.500	99,98	
				Output	Tersedianya Dasar Hukum	%	100%	99,98 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja					% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	
				yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif					
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,98 %	
02.2.01.10			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.22.100.000	Rp.22.094.250	99,97
				Output	Tersedianya Dasar Hukum yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif	%	100%	99,97 %	
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,97 %	
02.2.01.12			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.372.455.000	Rp.371.837.700	99,83
				Output	Tersedianya Dasar Hukum	%	100%	99,83 %	

No.	Program	Indikator Program	Kinerja					% Pencapaian	Ket	
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
			Komunitas		yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif					
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,83 %		
02.2.01.13			Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabuoaten / Kota	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.335.000.000	Rp.320.515.000	95,68	
				Output	Tersedianya Dasar Hukum yang Mengatur Keterbukaan Publik , Presentase Website Perangkat Daerah yang Terupdate dan Presentase KIM Aktif	%	100%	95,68 %		
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	95,68 %		
03	Program Aplikasi	Persentase Tingkat	Pengelolaan E – Government di							

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
	<u>Infomatika</u>	keamanan informasi pemerintah Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota							
03.2.02.01			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.100.000.000	Rp.99.729.900	99,73	
				Output	Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan Presentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Telah Terintegritas	%	100%	99,73 %		
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,73 %		
03.2.02.03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.96.000.000	Rp.90.000.000	93,75	
				Output	Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan	%	100%	93,75 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja					% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	
				Presentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Telah Terintegritas					
				Outcome Terlaksananya Kegiatan	%	100%	93,75 %		
03.2.02.06			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Inpute Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.171.667.000	Rp.163.529.806	95,26	
				Output Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan Presentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Telah Terintegritas	%	100%	95,26 %		
				Outcome Terlaksananya Kegiatan	%	100%	95,26 %		
03.2.02.07			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Inpute Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	100	
				Output Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan Presentase Aplikasi	%	100%	100 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
					Perangkat Daerah yang Telah Terintegritas					
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	100 %		
03.2.02.08			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.130.000.000	Rp.129.990.000	99,99	
				Output	Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan Presentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Telah Terintegritas	%	100%	99,99 %		
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	99,99 %		
03.2.02.09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.197.837.700	Rp.195.632.700	98,89	
				Output	Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan Presentase Aplikasi Perangkat Daerah yang	%	100%	98,89 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
					Telah Terintegritas					
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	98,89 %		
03.2.02.10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.219.880.000	Rp.214.412.000	97,51	
				Output	Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan Presentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Telah Terintegritas	%	100%	97,51 %		
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	97,51 %		
02.2.01.11			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.10.000.000	Rp.9.990.000	99,90	
				Output	Presentase Layanan Pemerintah Yang Berbasis Elektronik dan Presentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Telah Terintegritas	%	100%	99,90 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan					
02.2.01	Penyelengga raan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota							
02.2.01.06			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.137.200.00 0	Rp.137.200.000	100	
				Output	Tersajinya Data Statistik	%	100%	100 %		
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	100 %		
02	<u>Penyelengga raan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</u>	<u>Terselenggara nya persandian untuk pengamanan informasi</u>	<u>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</u>							
02.2.01.03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Inpute	Tersedianya Dana	Rupiah	Rp.142.951.00 0	Rp.136.395.781	95,41	
				Output	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis	%	100%	95,41 %		

No.	Program	Indikator Program	Kinerja						% Pencapaian	Ket
			Uraian Kegiatan	Indikator Kerja		Satuan	Target	Realisasi	Target	
					Elektronik dan Non Elektronik dapat terjaga					
				Outcome	Terlaksananya Kegiatan	%	100%	95,41 %		

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah :
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja**
- 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian.**

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel. 3.1
Penetapan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika									
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	65	67	70	70
		Indeks SPBE	Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang	Indeks	3,32	3,50	3,55	3,60	3,70	3,70
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
		Tingkat keamanan Informasi	Jumlah nilai per area keamanan	%	62	63	63	64	65	65
		pemerintah	informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%							
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									

		Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	71	72	72,5	73	73,50	73,50

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

A. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

B. Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar, sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1
Recana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024 - 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DANA INDIKATIF		SUMBER DANA
		2024	2025	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.058.190.676	6.100.000.000	APBD KAB.
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	18.837.400	45.000.000	APBD KAB.
2.	Administrasi Keuangan perangkat daerah	4.579.907.634	4.870.000.000	APBD KAB.
3.	Adminstrasi umum perangkat daerah	271.645.642	905.000.0000	APBD KAB.
4.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	29.800.000	60.000.000	APBD KAB.
5.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	158.000.000	220.000.000	APBD KAB.
II.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.789.700.000	2.788.061.000	APBD KAB.
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	1.789.700.000	2.788.061.000	APBD KAB.

							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan				5 Orang	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar		100.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	41		40	2.010.600.000,00						41%	3.861.798.000,00	
	2	16	03	2.02			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik/Jumlah aplikasi pemerintah keseluruhan dikali 100% Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	12Bulan 12Bulan		1 Laporan 1 Dokumen	2.010.600.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar	12Bulan 12Bulan	3.861.798.000,00	
	2	16	03	2.02	0013		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional													
								Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional			100 Aplikasi	260.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar		280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0014		Koordinasi penyusunan proses bisnis													
								Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo			100 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar		350.000.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0015		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda													
								Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			100 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar		206.830.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0017		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi													
								Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah			100 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0019		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
								Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			100 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar		195.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0021		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
								Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			100 Aplikasi	60.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Karanganyar		250.000.000,00	

															berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif				
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	57.119.950,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-		13.105.760,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6.167.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	-		13.696.060,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	-			100 Persentase	77.218.500,00		-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	-	-	64.584.800,00	
Jumlah											9.158.657.537,00							13.635.823.420,00	

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sesuai dengan visi misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak khususnya *stake holder* yang berkait erat dengan urusan Komunikasi dan Informatika. Dengan melibatkannya *stakeholder* dalam proses perencanaan memanfaatkan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten hingga Pusat.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Prioritas program/kegiatan selain diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada perkembangannya, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan sesuai rencana, namun demikian tetap memperhatikan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kunci sukses pembangunan daerah dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Di samping itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholder*). Pelaksanaan sesuai rencana yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran juga tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu serta bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah harus menjadi pedoman dan dipahami oleh pelaksana tidak terbatas pada komponen SDM perencanaan dengan demikian komitmen agar tercapai sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman serta acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI

Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Sekretaris BAPERLITBANG	
4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPERLITBANG	